BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Pusat Kerjasama Standardisasi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Pusat Kerjasama Standarisasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Kerjasama Standardisasi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Kerjasama Standardisasi internasional adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan standardisasi di tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional, notifikasi Indonesia dari dan ke WTO, kesekretariatan panitia nasional dan kelompok kerja dalam rangka kerjasama standardisasi tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional serta penyelesaian hambatan teknis perdagangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
2. perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
3. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;

4. pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerah;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badan standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional;
6. pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri.

Struktur Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1
Struktur Organisasi Pusat Kerjasama Standardisasi

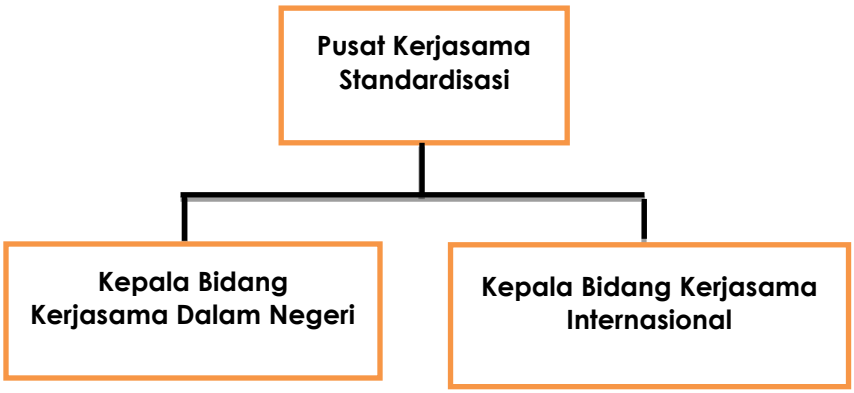

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri dengan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan pembinaan kegiatan kerjasama standardisasi lintas sektoral dan daerah, kerjasama prasarana perdagangan dalam rangka penyelesaian hambatan teknis perdagangan lintas sektoral dan daerah.
2. Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan standardisasi di tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional, notifikasi Indonesia dari dan ke WTO, kesekretariatan panitia nasional dan kelompok kerja dalam rangka kerjasama standardisasi tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional serta penyelesaian hambatan teknis perdagangan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017, Pusat Kerjasama Standardisasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak lima belas orang (22) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Pusat Kerjasama Standardisasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi	1	-	-	-	1

3.	Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional	-	-	1	-	1
4.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Bilateral dan Regional	-	1	-	-	1
5.	Analis Kerjasama Bilateral dan Regional	1	2	1	-	4
6.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Multilateral dan Internasional	-	-	1	-	1
7.	Analis Kerjasama Multilateral dan Internasional	-	3	-	-	3
8.	Kepala Sub Bidang Notifikasi	-	-	1	-	1
9.	Analis Notifikasi	-	3		-	3
10.	Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri	-	1	-	-	1
11.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Teknis Standardisasi	-	-	1	-	1
12.	Analis Kerjasama Teknis Standardisasi	-	1	-	-	1
13.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Prasarana Standardisasi	-	-	1	-	1
14.	Analis Kerjasama Kerjasama Prasarana Standardisasi	-	2	-	-	2
	Jumlah	**2**	**14**	**6**	**-**	**22**

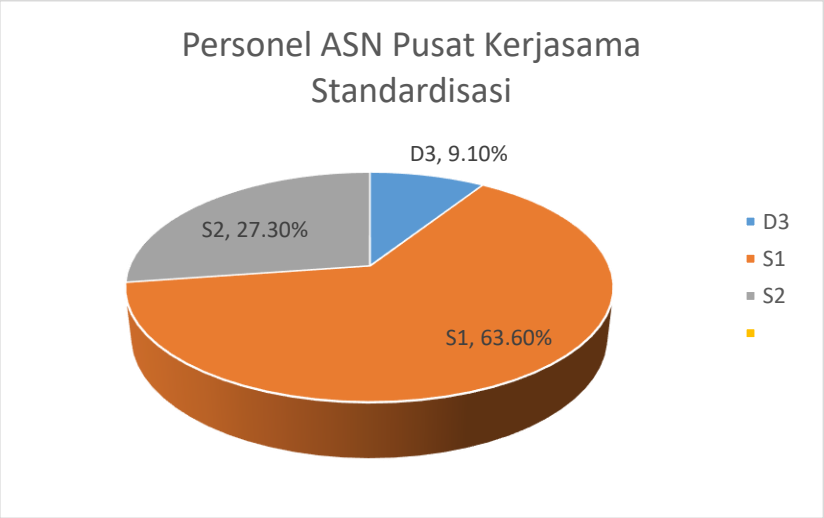

Gambar I.2
Grafik Personel ASN Pusat Kerjasama Standardisasi

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mengembangkan kerjasama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian baik dalam forum Nasional, Bilateral, Regional dan Multilateral serta melaksanakan fungsi BSN sebagai *Notification Body* dan *Enquiry Point* Indonesia dalam forum WTO . Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pusat Kerjasama Standardisasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Pusat Kerjasama Standardisasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Kontribusi bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam fasilitasi perdagangan internasional	1. Koordinasi dengan K/L terkait dalam perundingan/negosiasi *Free Trade Agreement* (FTA)	1. Mengembangkan jejaring kerjasama (*networking*) dengan K/L dan para pemangku kepentingan terkait
2. Dukungan terhadap posisi ofensif dan defensif Indonesia untuk bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam forum TBT WTO	2. Kurangnya partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan standar internasional	2. Memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung pengembangan standardisasi internasional (pembuatan portal, sosial media, dll)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kerjasama Standardisasi berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi Nasonal 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2017, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja BSN yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2017, serta dilakukan Evaluasi Pencapaian atas Penetapan Kinerja Tahun 2017.

II.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan aktivitasmya, Pusat Kerjasama Standardisasi berpedoman pada Misi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi 2015-2019 sebagai berikut:

VISI

Menjadi unit kerja BSN yang terpercaya dalam memfasilitasi kerjasama standardisasi untuk mendukung terakomodasinya kepentingan Indonesia di tingkat internasional.

MISI

1. Penguatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama Standardisasi di dalam negeri, bilateral , regional dan internasional
2. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat *Notification Body* dan *Enquiry Point* untuk pemenuhan Perjanjian TBT-WTO
3. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat ISO dan IEC, ACCSQ, APEC SCSC dan PASC.
4. Penguatan fungsi *Sponsoring Authority*.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi dirumuskan lima tahun yang teruang dalam Renstra PKS 2015-2019 serta Renstra BSN. Rumusan tujuan Pusat Kerjasama Standardisasi adalah sebagai berikut :

TUJUAN

1. Meningkatnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Meningkatnya pengembangan standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Meningkatnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Kerjasama Standardisasi selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Kerjasama dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2017, sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Kerjsama Standardisasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Terwujudnya kerjasama standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Terwujudnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Terwujudnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Terwujudnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2017 juga mengalami perubahan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasma Standardisasi Kerjasama Standardisasi Tahun 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Customer Perspectives					
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	10	kerjasama
		2	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	15	kerjasama
		3	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	15	kerjasama
Internal Process Perspectives					
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	85	kerjasama

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang STRACAP	5	Persentase kerjasama di bidang STRACAP yang disepakati di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan	100	%
		6	Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral	100	%
		7	Persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional	100	%
4	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	8	Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	70	%
5	Terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	9	Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT)	100	%
		10	Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100	%
6.	Terlaksananya layanan jasa Issuer Identification Number	11.	Jumlah Layanan aplikasi IIN	10	Aplikan
Learning and Growth Prospective					
7.	Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran , sumber daya	12.	Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN) PKS yang meningkat kompetensinya	100	%
		13.	Realisasi anggaran PKS	≥95	%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		14.	Persentase pencapaian kinerja PKS	90	%
		15.	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100	%
		16.	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100	%
		17.	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKS	75	%
		18.	Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan IIN (skala 1-100)	85	%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Kerjasama Standardisasi pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional melaksanakan program Kesepakatan Kerjasama Standardisasi. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Kerjasama Standardiasi melalui :

1. **Kegiatan : Melaksanakan Pengembangan dan Implementasi Kerjasama Bidang SPK di tingkat Nasional** dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
   a. Pengembangan Kesepakatan Kerjasama Standardisasi Tingkat Nasional

Pada tahun 2017 Bidang kerjasama standrdisasi dalam negeri telah melakukan pengembangan kerjasama standardisasi dengan beberapa Instansi, lembaga/Kementerian dan Perguruan Tinggi anatar lain:

1. Universitas Lambung Mangkurat
2. Universitas Indraprasta PGRI
3. Universitas Islam Malang
4. Universitas Tanjung Pura
5. Universitas Syiah Kuala
6. Universitas Nasional
7. Universitas Muhammadiyah Kupang
8. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
9. PT KAI
10. MoU BNSP, BIG dan KAN
11. BNN

b. Implementasi Kesepakatan Kerjasama Standardisasi Tingkat Nasional; Dalam melaksanakan ditindaklanjut dari Kesepakan Kerjasama Standardisasi ditingkat Nasional, Bidang Kerjasama Standardisasi

dalam negeri telah melakukan kegiatan – kegiatan untuk mengisi hasil dari kesepakatan tersebut diantaranya ;

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 2 Februari 2017;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, serta implementasi kegiatan berupa Sosialisasi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Biro Hukum Organisasi dan Humas BSN pada tanggal 10 Maret 2017;
3. Pelaksanaan Seminar Kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Pamekasan sebagai implementasi Kesepakatan Bersama antara BSN dengan Pemkab. Pamekasan pada tanggal 21 Maret 2017;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta implementasi kegiatan berupa Sosialisasi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Biro Hukum Organisasi dan Humas BSN pada tanggal 6 April 2017;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta implementasi pendirian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Makassar pada tanggal 13 April 2017;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 April 2017 serta implementasi pendirian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Palembang pada tanggal 23 Mei 2017;
7. Pelaksanaan Seminar Forum Standardisasi sebagai implementasi Kesepakatan Bersama antara BSN dengan PT. Pertamina (persero) di Kantor Pusat PT. Pertamina pada tanggal 8 September 2017.

8. Pelaksanaan Seminar Bulan Mutu Nasional di Makassar sebagai implementasi kerjasama standardisasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Oktober 2017;
9. Pelaksaanaan kunjungan audiensi kerjasama standardisasi dengan Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Prov. Riau pada tanggal 22 November 2017.

2. **Kegiatan; Penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum bilateral, regional dan internasional** dengan output yang dihasilkan antara lain:

c. Partisipasi dalam forum Pengembangan dan Implementasi Kerjasama SPK di tingkat Bilateral dan Regional

Rapat koordinasi antara K/L

Selama tahun 2017, PKS melaksanakan rapat koordinasi dengan K/L untuk membahas dokumen draft text MoU NSB/SDO (UL, ASME, TAPPI, IAPMO,SAC) persiapan posisi Indonesia untuk sidang ACCSQ,RCEP penyiapan posisi Indonesia untuk sidang Indonesia Australia (IA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia – Chile (IC) CEPA, Indonesia EU (IEU) CEPA, Indonesia – EFTA CEPA.

d. Penguatan Posisi Indonesia di forum Bilateral dan Regional

Tabel II Partisipasi Indoensia di forum Bilateral dan Regional

No	Nama Pertemuan	Tempat Pelaksanaan
Bilateral FTA		
1.	Indonesia – EU CEPA	Bali, Brussel
2.	Indonesia – Australia CEPA	Jakarta, Canberra
3.	Indonesia Chile CEPA	Jakarta
4.	PTA Iran	Jakarta - Indonesia
5.	SKB Turki (anggota)	BSD, Indonesia
Regional ASEAN, ASEAN+FP		
1.	ACCSQ (Focal Point)	Brunei dan Kamboja
2.	Working Group 1	Philiphine
3.	APWG	Bali,Indonesia
4.	PFPWG	Kamboja
5.	RCEP /STRACAP	India, Jepang, Philiphina
6.	JSC EE MRA	Bandung, Indonesia
APEC- Subcommittee on Standard and Conformance dan PASC		
7.	APEC SCSC 1 dan 2	Nathrang, Viietnam dan Ho Chi Minh City
8.	Pasific Accreditation Standard and Conforance	Vancouver Canada
9.	Capacity Building for SMEs	Ho Chi Minh City, Vietnam

e. **posisi Indonesia dalam forum ISO/IEC**

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi baik internal maupun dengan K/L terkait untuk menyusun Posisi Indonesia sehubungan dengan keanggotaan Indonesia di forum multilateral dan Internasional.
2. Pembahasan persiapan sidang ISO/IEC

3. Menghadiri sidang ISO di Berlin, Jerman pada September dan Sidang IEC di Vladivostok pada bulan Oktober untuk menyampaikan posisi Indonesia secara formal dalam sidang dan melakukan pertemuan informal dengan negara/NSB/NC/SDO lain untuk melakukan inisiasi dan evaluasi terkait kerjasama Multilateral dan Internasional.
4. Menghadiri sidang teknis ISO/TC 207/SC 7 dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia serta menjalankan peran Indonesia selaku Convenor dan sekretaris pada WG 7 dan sidang ISO/TC 292, dimana Indonesia menjadi project leader pengembangan standar ISO pada WG3.
5. Penanganan Komite Nasional IEC, Komite ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan dan membahas isu dan kebijakan standardisasi terkait bidang elektroteknika serta dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam forum IEC. Komite terdiri dari para pemangku kepentingan terkait.
6. Menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang ISO/TC 296 pada bulan Agustus di Jakarta, sidang ISO/TC 176 pada bulan September di Bali, sidang ISO/TC 130 pada bulan Desember di Surakarta. Kegiatan diatas dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan nasional untuk berpartisipasi aktif di forum internasional

3. Kegiatan: Penanganan Notifikasi dan Enquiry di Forum Komite TBT-WTO
Output: Posisi Indonesia dalam forum komite TBT WTO

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi baik internal maupun dengan departemen terkait menanggapi enquiry.
2. Pembahasan persiapan sidang TBT WTO
3. Menghadiri sidang TBT WTO di jenewa pada bulan Maret, Juni dan November 2017 untuk menyampaikan posisi Indonesia secara formal

dalam sidang dan melakukan pertemuan informal dengan negara lain untuk melakukan negosiasi terkait isu hambatan teknis perdagan

4. Penanganan Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (HTP). Komite ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan dan membahas isu spesifik dalam memperkuat posisi Indonesia dalam forum TBT-WTO. Komite terdiri dari para pejabat dari Kementerian dan Lembaga terkait.
5. *Capacity Building* SDM dalam pemahaman Perjanjian TBT-WTO

   Peningkatan kapasitas dilakukan dengan melakukan diseminasi terkait perjanjian TBT kepada seluruh pemangku kepentingan dan menyampaikan regulasi teknis yang telah ditetapkan di negara tujuan ekspor. Selain hal tersebut penyampaian fasilitas ePing WTO untuk kemudahan akses informasi hambatan teknis perdagangan WTO. Untuk memudahkan akses informasi maka dibentuk website TBT guna memfaslitasi dalam penyampaian informasi terkait regulasi dalam negeri maupun luar negeri yang dinotifikasi oleh negara negara anggota WTO.

6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Kerjasama Standrdisasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Kerjasama Standardisasi maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Pusat Kerjasama Standardisasi yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	Realisasi	Capaian (%)
Customer Perspectives						
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	10 kerjasama	PT. Pertamina PT. KAI, Univ. Muuhamadiyah Sukabumi, Univ. Muh. Malang, Univ. Brawijaya, Polri, UNS, ,IAPMO, ASTM	100%
		2	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	15 kerjasama	Prov. Babel, Prov. Sulsel, Kab. Sumedang, Prov.Sumsel, Kab. Madiun, Kba. Garut, Kab Malang, JSC EE	100%
		3	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	15 kerjasama	ISO / IEC Prov. Babel, Prov. Sulsel, Kab. Sumedang, Prov.Sumsel, Kab. Madiun, Kba. Garut, Kab Malang, JSC EE	100 %
Internal Process Perspectives						
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	68 kerjasama	ASME,NACE, TAPPI, IAPMO, ASTM, ACFTA, AANZFTA, PASC, APEC, ASEAN, ISO,IEC, WTO, D8, AHKFTA, BIS, BSI dll	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang STRACAP	5	Persentase kerjasama di bidang STRACAP yang disepakati di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan	100%	4 Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan NSB/SDO - Kepentingan Indonesia terkait chapter TBT/STRACAP telah diakomodasi dalam forum Bilateral dan Regional (2 draft Agreement TBT STRACAP conclude tahun 2017	100%
		6	Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral	100%	Kepentingan Indonesia terakomodasi melalui keanggotaan pada forum standardisasi internasional ISO dan IEC	100%
		7	Persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional	100%	Tersampaikannya posisi dan masukkan Indonesia untuk balloting fdraft standar ISO/IEC	100%
4	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	8	Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di	70%	Terlaksananya kesepakatan dan komitmen Indonesia pada forum ISO/IEC	100%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	Realisasi	Capaian (%)
			bidang SPK yang harus dipenuhi		dengan mendukung dan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan teknis ISO/IEC	
5	Terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	9	Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT)	100%	Kepentingan Indonesia pada tahun 2017 telah diakomodasi dalam sidang TBT WTO	100%
		10	Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100%	13 Regulasi Teknis telah dinotifikasi pada tahun 2017 dan 49 enquiry yang masuk pada tahun 2017 telah dijawab	100%
Learning and Growth Perspectives						
6	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKS yang profesional	11	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKS yang meningkat kompetensinya	100%	Training SNI ISO 17025, SNI ISO 26000	100%
		12	Realisasi anggaran PKS	≥95%	98.4 %	100%
		13	Persentase pencapaian kinerja Bidang KSI	90%	92 %	100%
		14	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100%	100 %	100%
		15	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100%	100 %	100%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	Realisasi	Capaian (%)
		16	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKS	75%	75%	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1 **Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan**

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	10	10	100	100%	-
2. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	15	15	100	100%	
3. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	15	15	100	100%	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentinan melalui kerjasama ditingkat Nasional, bilateral, regional dan keanggotaan Indonesia dalam forum Multilateral dan Internasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan Indonesia.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1:

Indikator Kinerja 1: Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi

Indikator Kinerja 2: Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional

Indikator Kinerja 3: Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail

Dalam rangka peningkatan keberterimaan implementasi penerapan SNI di pasar, maka pengembangan SNI semaksimal mungkin diharmoniskan dengan standar – standar internasional yang menjadi preferensi di pasar dunia, seperti ISO dan IEC. Sehubungan dengan hal tersebut, BSN melalui Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional khususnya Subbidang Kerjasama Multilateral dan Internasional (KMI) menjalankan fungsinya sebagai sekretariat focal/kontak poin Indonesia dalam dua forum pengembang standard internasional, yaitu ISO dan IEC, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang KSI memastikan Indonesia selaku anggota ISO dan IEC dapat memenuhi pembayaran kontribusi iuran keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional (OI) yaitu ISO dan IEC secara tepat waktu, menjaga Intelectual Property Rights (IPR), berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan standardisasi (balloting, menghadiri pertemuan teknis dan non – teknis), menjalankan komitmen dan kesepakatan kerjasama (menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Sidang komite teknis) dan lain lain.
Keanggotaan Indonesia pada ISO dan IEC adalah sebagai *full-member*. Pada kedua organisasi tersebut, status keanggotaan di TC/SC dibagi dua kelompok berdasarkan keaktifan serta tanggung jawabnya yaitu sebagai Participating Member (P-Member) dan Observer Member (O-Member). Grafik keanggotaan Indonesia pada komite teknis ISO dan IEC tercermin pada grafik di bawah:

Grafik keanggotaan Indonesia pada komite teknis ISO dan IEC tercermin pada grafik di bawah:

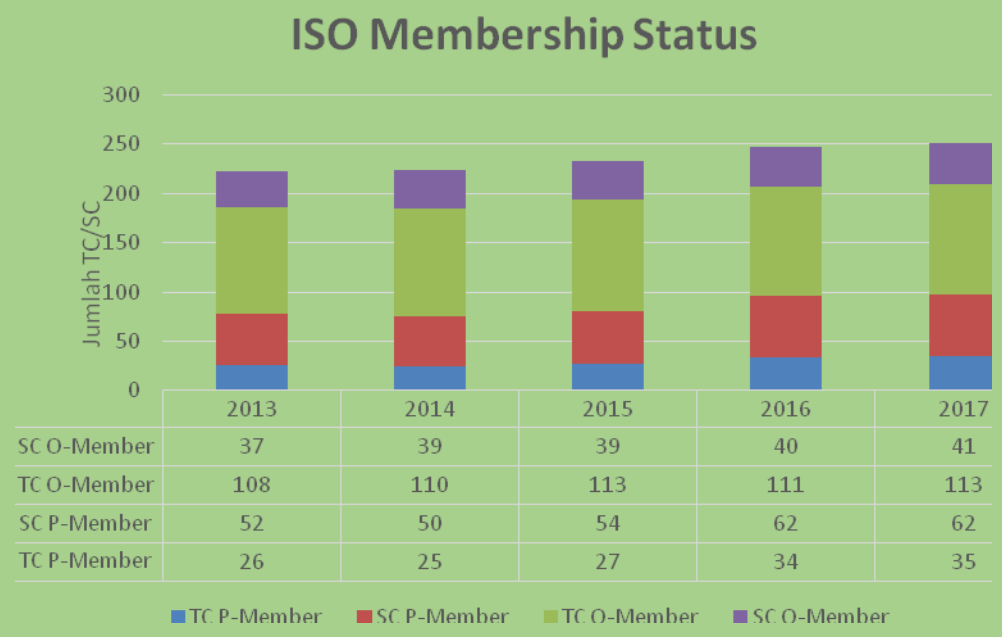

	2013	2014	2015	2016	2017
SC O-Member	37	39	39	40	41
TC O-Member	108	110	113	111	113
SC P-Member	52	50	54	62	62
TC P-Member	26	25	27	34	35

Gambar X. Grafik keanggotaan Indonesia pada ISO/TC/SC

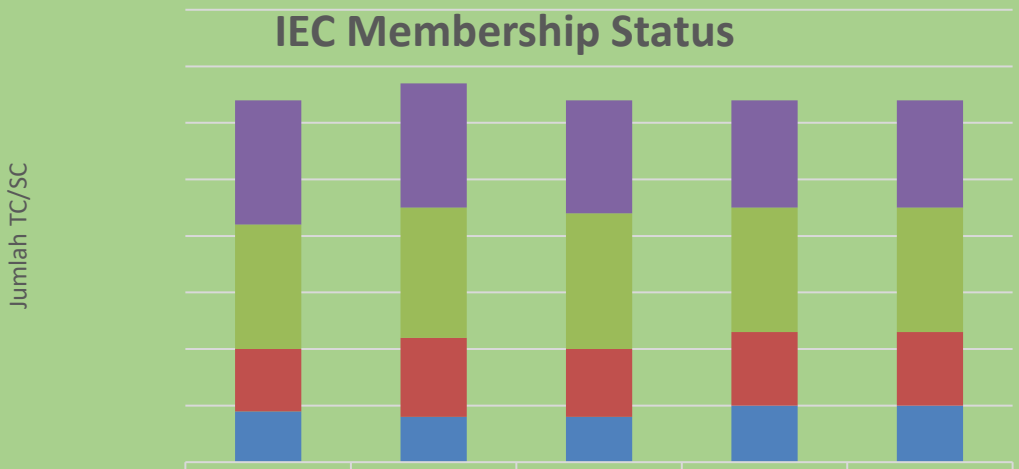

	2013	2014	2015	2016	2017
SC O-Member	22	22	20	19	19
TC O-Member	22	23	24	22	22
SC P-Member	11	14	12	13	13
TC P-Member	9	8	8	10	10

Gambar X. Grafik keanggotaan Indonesia pada IEC/TC/SC

Jumlah partisipasi Indonesia pada ISO/Technical Committee (TC)/Sub-committee (SC) hampir setiap tahunnya tercatat meningkat. Meskipun pada tahun 2014 keanggotan Indonesia cenderung menurun, namun pada tiga tahun terakhir (2015 – 2017) partisipasi Indonesia meningkat. Pada tahun 2017 Indonesia Participating (P) – Member pada 35 TC dan 62 SC serta Observer (O) – Member pada 113 TC dan 41 SC. Peningkatan jumlah partisipasi Indonesia pada ISO/TC/SC dipengaruhi oleh meningkatnya keinginan pemangku kepentingan untuk dapat terlibat dalam pengembangan standar internasional, memperbaharui informasi, pengetahuan terkait teknologi yang sedang berkembang, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

Peran aktif Indonesia pada komite teknis IEC dalam beberapa tahun terakhir cenderung statis. Hal ini dikarenakan hingga saat teknologi yang berkembang dan diimplementasikan oleh industri elektroteknika nasional masih berada dibawah teknologi yang berkembang di dunia khususnya negara – negara maju yang banyak menjadi kontributor dalam pengembangan standar – standar IEC. Oleh sebab itu, partisipasi diprioritaskan untuk menjadi sarana transfer pengetahuan dan informasi terkait teknologi elektroteknika.

SASARAN 2 **Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan**

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
4. Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	100%	100%	100%	100%	

SASARAN 3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang STRACAP

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
5. Persentase kerjasama di bidang STRACAP yang disepakati di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan	100%	100%	100%	100%	
6. Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral	100%	100%	100%	Penguatan Posisi Indonesia melalui partisipasi dalam Pertemuan Teknis ISO/IEC	
7. Persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional	100%	100%	99.8%	- Tersampaikannya posisi dan masukan Indonesia dalam ballot draft ISO/IEC	0.02%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama bidang STRACAP melalui kerjasama dibidang STRACAP yang disepakati di forum Bilateral Regional dan Multilateral untuk memfasilitasi perdagangan, penguatan posisi Indonesia melalui peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral serta persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional;

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3:

Indikator Kinerja 1: Persentase kerjasama di bidang STRACAP yang disepakati di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan

Forum Bilateral dan Regional

Kerjasama di tingkat bilateral diarahkan guna mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui tukar menukar informasi mengenai pengembangan standar di kedua negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan merekomendasikan pengembangan standar melalui adopsi standar ke dalam standar nasional. Kerjasama dilakukan dengan institusi di negara mitra yang bertanggung jawab dalam pengembangan standaridisasi termasuk badan standardisasi nasional (NSB) maupun dengan organisasi pengembang standar (SDO). Selain itu, kerjasama di tingkat bilateral juga diarahkan untuk memfasilitasi perdagangan termasuk bidang standar dan keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk oleh lembaga sertifikasi produk antar kedua negara.

Dalam konteks kerjasama Bilateral, pada tahun 2017, BSN telah menandatangani 4 (dua) MoU dengan NSBs/SDOs, yaitu:

1. TAPPI

Ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2017 oleh Sestama BSN dan Vice President TAPPI

2. **UL** (Underwriter Laboratory) ditandatangani disela-sela sidang IEC GM di Vladivostok Rusia, pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh Kepala BSN dengan Director of Global Standard UL

3. IAPMO

Perpangan kembali masa berlaku MoU, dtamdatangani oleh Kepala BSN dengan Chief Executive Officer IAPMO pada tanggal 13 Juli 2017

4. ASME

Ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2017 oleh Sestama BSN dengan Executive Director ASME

TABEL XX REKAPITULASI MOU BILATERAL SDO/NSB (2011-2017)

No.	Tahun	MoU Baru	MoU Perpanjangan	TOTAL
1.	2012		1	1
2.	2013		2	2
3.	2014	3		3
4.	2015	1	1	2
5.	2016	2		2
6.	2017	3	1	4
TOTAL		**6**	**5**	**11**

Tahun 2017, diforum bilateral FTA, BSN mejadi lead negotiator untuk chapter Technical Barrier to Trade untuk kerjasmaa Indonesia Australia CEPA dan Indonesia – Chile CEPA. 2 (dua) kesepakatan dalam kerjasama tersebut telah diselesaikan pada akhir tahun 2017.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertindak sebagai *National Focal Point* dan koordinator dalam forum ACCSQ (ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality*). BSN bertugas memonitor perkembangan seluruh *Working Group* (WG) dibawah ACCSQ dan melakukan koordinasi dengan institusi terkait di tingkat nasional serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan komunikasi untuk memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam ASEAN *Economic Community* (AEC) *Score Card*. Dalam hal ini, BSN bertindak sebagai Sekretaris untuk ACCSQ PWG on *Automotives* (A-PWG) sejak Maret 2005 sampai dengan sekarang, dan ACCSQ PWG on *Prepared Foodstuff* (PF-PWG) sejak April 2003 sampai dengan sekarang. BSN juga bertindak sebagai *Co-Chair Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE) periode 2015-2016 dan *Contact Point Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE). Selain itu, BSN juga berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ACCSQ Plenary; PFPWG; APWG; dan JSC EEE.

Selain ASEAN, Indonesia juga menjadi focal Point dalam APEC Sub Commitee on Standards and Conformance. Pada tahun 2017, Indonesia terdapat 18 Proyek yang disampaikan melalui APEC SCSC, diantaranya terkait Food Safety, Silver Economy, Smart Cities, Energy Eficiency, Good Regulatory Practices WTO-TBT dll. Selain itu, Indonesia mengirimkan 37 peserta untuk mengikuti workshop/seminar yang dilaksanakan oleh ekonomi APEC antara lain Chile, Australia, Vietnam, Korea, China, Thailand dan Jepang. Indonesia juga mengajukan 1 (satu) CN terkait Material Flow Cash Accounting (ISO 14051) namun CN tersebut tidak diterima oleh Sekretariat;

Indikator Kinerja 6: Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral

Partisipasi Indonesia dalam forum Bilateral dan Regional

Selama tahun 2017, BSN berpartisipasi dalam pertemuan di forum standardisasi dan penilaian kesesuaian a.l melalui kerjasama fasilitasi perdagangan seperti CEPA/PTA untuk klasul TBT/STRACAP, PASC, ACCSQ/PWGs, ASEAN+Foreign Partner, PASC, APEC SCSC dll seperti pada tabel XX Partisipasi Indoensia di forum Bilateral dan Regional.

Penguatan posisi Indonesia dalam forum Multilateral/Internasional (ISO/IEC)

Dalam rangka memaksimalkan manfaat keanggotaan Indonesia pada ISO dan IEC, Indonesia berusaha untuk memperkuat posisi melalui peningkatan peran aktif pada kegiatan teknis maupun strategis. Peran sebagai pemangku kebijakan ISO dan IEC ini dinilai penting untuk dicapai mengingat potensi peluang Indonesia untuk dapat mewarnai kebijakan – kebijakan di dalamnya. Pada tahun 2017, Indonesia mengajukan beberapa kandidat untuk dapat menduduki posisi strategis baik di ISO maupun IEC. Melalui pemilihan umum yang diselenggarakan pada ISO/GA, Indonesia berhasil mempromosikan Dr. Puji Winarni untuk menjadi Anggota ISO Council Periode 2018 – 2020. Disamping itu, pada akhir semester 2017, Indoensia juga tengah mengusulkan Dr. Zakiyah untuk menjadi anggota *ISO Commercial Policy Advisory Group (CPAG),* yang hasilnya akan diketahui pada tri wulan pertama 2018. Pada forum IEC, Indonesia

mencalonkan Donny Purnomo Januardhi Effyandono untuk bersaing menjadi anggota IEC – CAB, namun berdasarkan berdasarkan hasil voting saat IEC GM tidak dapat menduduki anggota IEC – CAB. Melalui momen pencalonan seperti ini, Indonesia dapat lebih tampil dan didengar visi misinya untuk berkontribusi memajukan forum standardisasi dunia.

Penguatan posisi Indonesia pada forum teknis diwujudkan melalui kontribusi Indonesia dengan menjalankan peran sebagai pemimpin pada beberapa komite teknis, seperti Convenor dan sekretaris ISO/TC 207/ SC 7/ WG 7 Framework Standard yang tengah mengembangkan standar *ISO 14080 Greenhouse gas management and related activities -- Framework and principles for methodologies on climate actions, Convenor pada ISO 296 WG 1 Terminology of bamboo products*, dan *Project Leader* pada *ISO/TC 292/WG 3 Emergency management* untuk pengembangan standar ISO *ISO/DIS 22327 Security and resilience -- Emergency management -- Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system.*

Disamping itu, penguatan posisi Indonesia juga dilakukan dengan berpartisipasi pada pertemuan – pertemuan teknis, Sepanjang tahun 2017, Indonesia tercatat berpartisipasi pada kurang lebih 10 pertemuan teknis ISO seperti ISO/TC 292, ISO/TC 207, ISO/TC 309, ISO/TC 296, ISO/TC 176, dan ISO/TC 130.

Indikator Kinerja 7: Persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional

Indikator difokuskan pada penguatan posisi Indonesia khususnya dalam kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC, serta memfasilitasi kerjasama dalam mendukung perumusan SNI, dan implementasinya dalam mendukung perdagangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta.

Peran aktif Indonesia dalam kegiatan teknis (pengembagan standar internasional) pada forum ISO dan IEC salah satunya tercermin melalui penyampaian posisi Indonesia terhadap jajak pendapat draft standar ISO dan IEC. Grafik berikut menunjukkan data statistik draft yang telah ditanggapi oleh Indonesia.

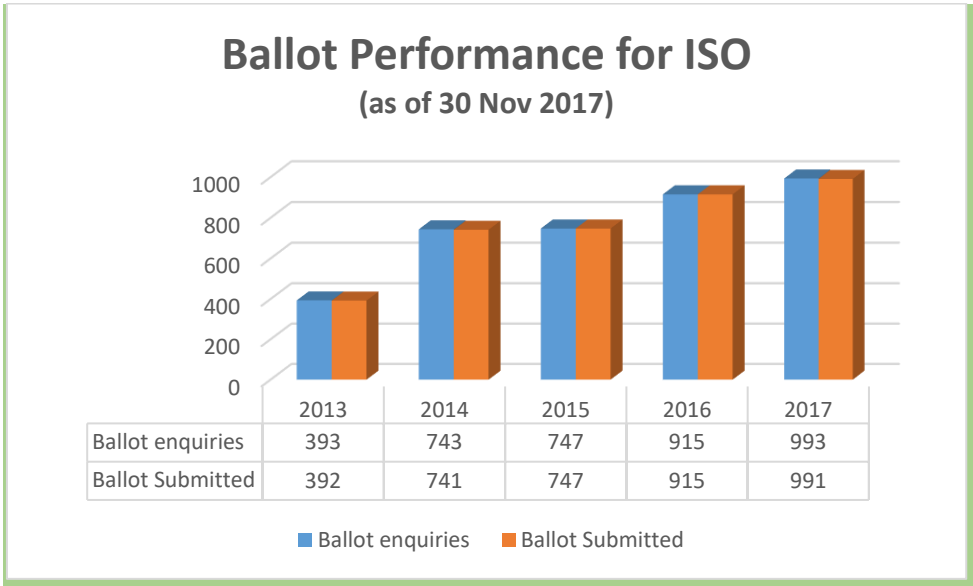

Gambar XX. Grafik kinerja jajak pendapat Indonesia pada pengembangan standar ISO

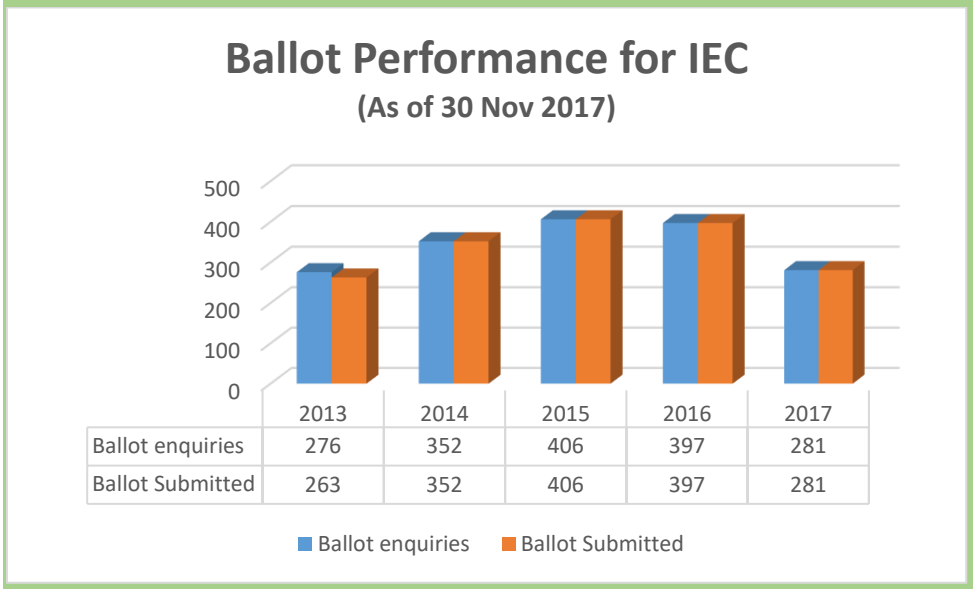

Gambar XX. Grafik kinerja jajak pendapat Indonesia pada pengembangan standar IEC

Posisi Indonesia terhadap draft standar baik ISO maupun IEC disusun oleh National Mirror Committee (NMC) yang beranggotakan pakar – pakar nasional yang mewakili empat komponen pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Teknis/Regulator, sektor industri, akademia dan konsumen. Posisi Indonesia dapat berupa persetujuan, penolakan, maupun abstensi. Untuk persetujuan dan penolakan, Indonesia akan memberikan posisi

disertai pertimbangan baik teknis maupun non – teknis terhadap substansi standar dimaksud, dan atau menyampaikan masukan terhadap konten standar jika diperlukan. Posisi Indonesia tersebut selanjutnya disampaikan melalui ISO ballot portal secara terpusat oleh PIC Pusat Kerjasama Standardisasi.

Kinerja penyampaian jajak pendapat diukur melalui rasio jumlah jajak pendapat yang masuk dan yang telah ditanggapi oleh Indonesia. Secara general kinerja penyampaian posisi Indonesia terhadap jajak pendapat/ballot ISO dan IEC dari tahun 2013 – 2017 mencapai 98%, bahkan pada 2015 dan 2016 kinerja balloting ISO dan IEC mencapai 100%. Pada tahun 2017, kinerja balloting untuk IEC mencapai target atau 100%, namun untuk ISO turun menjadi 99.8%. Hal ini dikarenakan pada tahun berjalan terdapat 2 kali keterlambatan penyampaian posisi/miss ballot pada ISO/TC 34. Peningkatan jumlah balloting 2017 yang hampir mencapai 10%, tinggi beban kerja serta terbatasnya SDM diidentifikasi menjadi penyebab miss ballot. Tindakan korektif telah dilakukan oleh sekretariat di PKS – BSN yaitu dengan berkorespodensi dengan sekretariat ISO terkait untuk menyampaikan alasan dibalik keterlambatan penyampaian posisinya dan keinginan Indonesia untuk tetap dapat berpartisipasi dalam ISO/TC terkait. Dengan pertimbangan tersebut, Indonesia tetap menjadi anggota P - Member ISO/TC 34.

SASARAN 4	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
8. Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	100%	70%	100	100%	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK yang disepakati di forum Multilateral dan internasional ditetapkan melalui realisasi rencana program kerjanya berupa dukungan dan atau tuan rumah penyelenggaan Plenary Meeting ISO/TC 296 Bamboo and Rattan, ISO/TC 176 Quality

Management and Assurance, ISO/TC 130 Graphic Technology dan Seminar IECEx. Selain sebagai wujud tindak lanjut dan implementasi kesepakatan Indonesia pada ISO/TC terkait, Program atau kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi pemangku kepentingan nasional untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan standar internasional. Melalui kegiatan ini Indonesia dapat melibatkan lebih banyak pakar – pakar nasional yang lebih banyak, sehingga kepentingan Indonesia terhadap substansi standar yang dikembangkan dapat terakomodir.

Gambar XX. Penyelenggaraan The 2nd Plenary Meeting of ISO/TC 296, 22 – 24 Agustus 2017 Jakarta, Indonesia

Gambar XX. Penyelenggaraan The 33rd Plenary Meeting of ISO/TC 176, 11 – 15 September 2017 Bali, Indonesia

Gambar XX. Penyelenggaraan The 31st Plenary Meeting of ISO/TC 130, 4 – 9 Desember 2017 Surakarta, Indonesia

- Di bidang kelistrikan, pada tahun 2017 Indonesia menyelenggarakan seminar *International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres (IECEx System) dan IEC/TC 31 "Equipment for explosive atmospheres"* dengan pembicara dari perwakilan dari IEC APRC - Mr. Dennis Chew dan representative dari industry yang bergerak pada instrument untuk sistem *explosive atmostpahere* – Phoenix Contact. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai *moment* pertemuan dan ajang diskusi dengan stakeholder terkait lingkungan yang memungkinkan meningkatnya risiko bahaya kebakaran atau ledakan dan dihadiri sekitar 80 peserta. Dalam pertemuan ini berkaitan dengan kelistrikan, dan penggunaannya di area ini dicakup dalam berbagai standar IEC dan umumnya sangat diatur. Ini adalah kepentingan industri dan pemerintah untuk memastikan bahwa sebagian wilayah dan personil yang bekerja di wilayah tersebut aman bagi personil, masyarakat dan lingkungan.

Salah satu syarat anggota International Electrotechnical Committee (IEC) adalah membentuk Komite Nasional. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan standardisasi membentuk Komite Nasional untuk IEC (KOMNAS IEC) Indonesia yang beranggotakan wakil-wakil dari para pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2016 KOMNAS IEC telah melaksanakan dua kali pertemuan tahunan yang membahas kebijakan nasional di bidang kelistrikan dan partisipasi aktif stakeholders Indonesia dalam kegiatan standardisasi IEC.

Terlaksananya kegiatan – kegiatan diatas dengan sukses, menjadi parameter penilaian tercapainya target untuk indikaror (8) sasaran (4) dengan persentase realisi 100 %.

SASARAN 5	Terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO

Tabel III.I
Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
8. Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT)	100	100	100	100%	
9. Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100	100	100	100%	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 5. terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT) dan Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Indikator Kinerja: Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT)

Indikator secara global tercapai 100% yaitu dilakukan melalui penguatan posisi Indonesia dalan forum TBT WTO dilaksanakan dalam tiga kali sidang di WTO. Dalam sidang tersebut diperjuangkan kepentingan Indonesia untuk isu defensif dan isu ofensif. Untuk isu defensif pada tahun 2017 mencakup regulasi jaminan produk halal, pengaturan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), informasi pada produk makanan terkait kandungan garam,gula dan lemak, dan SNI mainan anak. Sedangkan untuk isu ofensif guna memfasilitasi perdagangan produk ekspor adalah terkait EU tobacco sale regulation, maksimum residu limit MRL anthraquinone di teh, importir biscuit (swiss), sertifikasi kapten kapal dan seafood import labelling. Posisi Indonesia disampaikan dalam sidang TBT WTO yang diselenggarakan pada bulan Maret, Juni dan November di Jenewa. Selain menyampaikan posisi dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pertemuan informal untuk negosiasi dengan negara lain anggota WTO untuk menyampaikan kepentingan Indonesia untuk menghindari spesifi trade concern (STC) yang dapat pada akhirnya menyebabkan dispute. Sejauh ini yang diangkat dalam isu STC adalah pemberlakuan SNI mainan anak dan regulasi produk halal. Indonesia memerlukan posisi yang kuat untuk tahun 2018 terkait pemberlakuan SNI mainan anak khususnya terkait dengan frekuensi pengambilan contoh yang berbeda antara produk impor dan produk dalam negeri, sehingga diperlukan data bahwa produksi dalam negeri dalam jangka waktu tertentu memiliki volume yang sama dengan satu kali impor produk sehingga mewakili frekuensi pengambilan contoh. Sedangkan untuk halal mengingat masih dalam pembahasn internal diperlukan dukungan semua pihak untuk menetapkan prioritas lingkup produk yang diberlakukan dalam regulasi halal serta menetapkan skema sertifikasi halal yang sejauh mungkin selaras dan ekivalen dengan sistem halal internasional.

Semua isu defensif dan ofensif tersebut dibahas dengan kementerian terkait dan membahas scientific evidence (bukti ilmiah) yang cukup dalam mempertahankan posisi Indonesia. Namun demikian penyediaan scientific evidence membutuhkan dukungan sumberdaya baik dalam hal kompetensi personel maupun infrastruktur penilaian kesesuaian (laboratorium) dan kerjasama dengan lembaga riset atau universitas terkait. Oleh karenanya Komite Nasional dibentuk untuk memperkuat dalam penetapan kebijakan dan koordinasi antar instanasi pemerintah guna sinkronisasi kegiatan dan sumberdaya dalam mendukung kepentingan Indonesia.

Capaian tahun ini sama dengan tahun 2016 yaitu 100% mengingat kita selalu berpartisipasi memperjuangkan kepentingan Indonesia baik dalam sidang informal maupun negosiasi informal yang dilakukan tiga kali dalam setahun. Yang membedakan adalah isu yang dibahas walaupun masih ada beberapa isu yang sama seperti halal dan mainan anak mengingat Indonesai merupakan pasar terbesar baik untuk produk halal maupun mainan anak.

1. **Indikator Kinerja :** Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO

TABEL III.2: PENANGANAN OUTGOING NOTIFIKASI DAN *ENQUIRY* PADA SUBBIDANG NOTIFIKASI PUSAT KERJASAMA STANDARDISASI BSN

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Notifikasi Regulasi Teknis	16	14	9	12	8	7
Adendum	22	9	23	8	4	6
Enquiry	45	53	76	43	47	49

Pencapaian penanganan notifikasi dan enquiry tercapai 100% sama dengan tahun lalu mengingat semua permintaan notifikasi kita sampaikan segera ke WTO dan semua enquiry kita tanggapi dengan koordinasi dengan instansi terkait serta mempertimbangkan standar dan skema penilaian kesesuaian yang ekivalen.

Pada tahun 2017 jumlah permintaan notifikasi menurun yaitu hanya 7 hal ini mungkin disebabkan instansi terkait sedang dalam melakukan review terhadap yang telah ditetapkan dan lebih kompresehnsif serta mempersiapakan risk impact assessment yang komprehensif dalam merancang regulasi teknis untuk mengurangi trade concern dari negara anggota WTO lainnya. Selain hal tersebut penyiapan scientific evidence untuk isu baik yg defensif maupun ofensif.

Jumlah enquiry meningkat dibanding tahun lalu namun dapat kita tanggapi dengan memuaskan. Ke depannya kita berharap enquiry terhadap regulasi teknis Indonesia yang kita notifikasi menurun sehingga menandakan bahwa regulasi yang kita sampaikan telah dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan trade concern. Namun disi lain menjadi wajar Indonesia melakukan perlindungan konsumen melalui regulasi teknis mengingat Indonesia dalah pasar terbesar untuk produk industri. Sehingga wajar jika negara pengekspor memberikan concernnya terkait regulasi Indonesia. Sebagai contoh untuk produk halal Indonesia adalah nomor 1 diantara negara muslim yang ada di dunia oleh akrenanya wajar bagi Indonesia memberlakukan semua produk yang didistribusikan jika halal wajib sertifikasi halal dan jika mengandung bahan yang tidak halal wajib diinformasikan kepada konsumen.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2017, Pusat Kerjasama Standardisasi dengan pagu anggaran adalah sebesar **Rp 6.069.666.000,-** dan realisasi anggaran Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2017 adalah sebesar **Rp 5.971.478.615** sebesar **98.4 %.**

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2017 per Out put dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Kerja Sama Standardisasi TA 2017

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2016		%
		Pagu	Realisasi	
3557.01	Kesepakatan Kerjasama Standardisasi	6,021,223,000	5,939,017,365	98.6
3557.02	Layanan Nomor Identifikasi Penerbit Kartu	48,443,000	32,461,250	67.01
	Jumlah	**6,069,666,000**	**5,939,017,365**	**98.4**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi-Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Pusat Kerjasama Standardisasi

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Konny Sagala
Jabatan : Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Plt. Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Puji Winarni	Konny Sagala

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT KERJASAMA STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer Perspectives		
1 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1 Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	10 kerjasama
	2 Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	15 kerjasama
	3 Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	15 kerjasama
Internal Process Perspectives		
2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4 Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	85 kerjasama
3 Meningkatnya kualitas kerjasama bidang STRACAP	5 Persentase kerjasama di bidang STRACAP yang disepakati di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan	100 %
	6 Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral	100 %
	7 Persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional	100 %
4 Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	8 Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	70 %
5 Terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	9 Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT)	100 %

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	10 Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100 %
6 Terlaksananya layanan jasa Issuer Identification Number (IIN)	11 Jumlah layanan aplikasi IIN	10 Aplikan
Learning and Growth Perspectives		
7 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKS yang profesional	12 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKS yang meningkat kompetensinya	100 %
	13 Realisasi anggaran PKS	≥95 %
	14 Persentase pencapaian kinerja PKS	90 %
	15 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100 %
	16 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100 %
	17 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKS	75 %
	18 Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan IIN (skala 1-100)	85 nilai

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Kerjasama Standardisasi	7.888.443.000

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua

Puji Winarni

Pihak Pertama

Konny Sagala